



Analisis *Nuclear Deterrence Strategy* dan Stabilitas Global

(Studi Kasus Krisis Rudal Kuba 1962)

Mutiara Anugerah Pekerti^{1*}, Elok Fitrotul Maulidah²

¹⁻² Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga, Indonesia

*Penulis Korespondensi: mutiaraanugerahp@gmail.com

Abstract. *This study examines the extent to which the nuclear deterrence strategy formulated by John M. Collins was effective when applied in the context of the Cuban Missile Crisis of 1962, as well as how the event prompted changes in the global arms control system and international collective security approaches. Using historical qualitative methods—including an examination of policy documents, official speeches, and behind-the-scenes negotiation processes—this study outlines the five main components of Collins' version of nuclear strategy: deterrence, flexible response, command control, arms control, and war termination. The research findings emphasize that successful deterrence relies heavily on the credibility of the nuclear threat as well as the effectiveness of crisis communications, including the use of hotlines between Washington and Moscow and back-channel diplomacy. The thirteen-day crisis also triggered the Partial Nuclear Test Ban Treaty (1963), which laid the foundation for the subsequent arms control regime. The study concludes that sustaining strategic stability requires a reliable deterrence strategy underpinned by a robust command structure and diplomatic mechanisms.*

Keywords: *Arms Control, Cuban Missile, Communication, Nuclear Deterrence, Strategic Stability*

Abstrak. Studi ini mengkaji sejauh mana strategi penangkalan nuklir yang dirumuskan oleh John M. Collins efektif ketika diterapkan dalam konteks Krisis Rudal Kuba tahun 1962, serta bagaimana peristiwa tersebut mendorong perubahan dalam sistem pengendalian senjata global dan pendekatan keamanan kolektif internasional. Dengan menggunakan metode kualitatif historis—mencakup telaah terhadap dokumen kebijakan, pidato-pidato resmi, serta proses negosiasi di balik layar—studi ini menguraikan lima komponen utama dalam strategi nuklir versi Collins: deterrence (MAD), tanggapan fleksibel, kendali komando, pengendalian senjata, dan penghentian perang. Temuan penelitian menekankan bahwa keberhasilan penangkalan sangat bergantung pada kredibilitas ancaman nuklir serta efektivitas komunikasi krisis, termasuk penggunaan hotline antara Washington dan Moskow serta diplomasi jalur belakang. Krisis yang berlangsung selama tiga belas hari ini juga menjadi pemicu lahirnya Perjanjian Pelarangan Uji Coba Nuklir Parsial (1963), yang kemudian menjadi fondasi bagi rezim pengendalian senjata berikutnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan stabilitas strategis memerlukan strategi penangkalan yang terpercaya dan ditopang oleh struktur komando serta mekanisme diplomatik yang tangguh.

Kata Kunci: Arms Control; Komunikasi, Rudal Kuba; Penangkalan Nuklir; Stabilitas Strategi

1. LATAR BELAKANG

Sejak berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945, sistem internasional memasuki era kompetisi struktural yang dikenal sebagai Perang Dingin. Fase ini ditandai oleh konfigurasi bipolar yang menempatkan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua kutub kekuatan dominan di dunia. Ketegangan ini tidak hanya mengenai ideologi dan politik saja, melainkan juga mencakup dimensi militer yang sangat intensif (Dini Ayu Amalia et al., 2026). Salah satu manifestasi paling nyata dari kompetisi ini adalah perlombaan senjata nuklir, yang berkembang menjadi elemen kunci dalam perhitungan kekuatan strategis global. Senjata nuklir ini muncul bukan hanya sebagai simbol supremasi kekuatan militer, melainkan juga sebagai instrumen utama dan penting dalam diplomasi koersif dan perundingan internasional. Dalam konteks ini, proliferasi hulu ledak nuklir dan pengembangan sistem peluncuran seperti ICBM

(*Intercontinental Ballistic Missiles*) dan SLBM (*Submarine-Launched Ballistic Missiles*) meningkatkan potensi eskalasi konflik menjadi perang global yang dapat mengancam keberlanjutan peradaban manusia (Mauroni, 2019).

Situasi tersebut menuntut negara-negara adidaya untuk membangun kerangka doktrin militer yang bersifat preventif, menginstitusionalisasi rezim kontrol senjata (*arms control*), serta mengembangkan infrastruktur komunikasi krisis yang dapat menghindari kesalahpahaman fatal dalam situasi genting. Stabilitas strategis menjadi kebutuhan mutlak untuk mencegah kehancuran menyeluruh dan disinilah strategi penangkalan nuklir memainkan peran yang penting (Farras Zakia Rahman et al., 2026). Dalam konteks tersebut, penulis berargumen bahwa efektivitas dari strategi penangkalan nuklir (*nuclear deterrence*), sebagaimana yang telah dijelaskan oleh John M. Collins, memiliki kontribusi yang sangat sentral dalam membentuk keseimbangan kekuatan selama Perang Dingin (Akhmad Lazuardy & Adzkiyak Adzkiyak, 2025). Krisis Rudal Kuba pada bulan Oktober 1962 merupakan salah satu bentuk penerapan teori penangkalan tersebut dalam situasi nyata, sekaligus juga momen uji terhadap kredibilitas ancaman nuklir sebagai instrumen diplomasi politik luar negeri dan stabilitas sistem internasional. Dalam pandangan penulis, doktrin penangkalan tersebut bukan sekedar representasi kalkulasi kemampuan destruktif, tetapi juga merupakan instrumen komunikasi strategis yang didasarkan pada persepsi ancaman, kredibilitas sinyal militer, dan asumsi rasionalitas pengambil keputusan negara.

Krisis Rudal Kuba pada Oktober 1962 menjadi studi kasus nyata terhadap penerapan dan pengujian prinsip-prinsip ini. Pada saat Uni Soviet secara diam-diam menempatkan rudal balistik berkepala nuklir di Kuba yang berjarak hanya 90 mil dari pantai selatan Amerika Serikat, dunia dihadapkan pada kemungkinan nyata terjadinya perang nuklir global. Presiden John F. Kennedy merespon melalui penerapan kebijakan blokade maritim—atau "karantina"—laut terhadap Kuba, disertai dengan berbagai upaya diplomasi terbuka maupun rahasia dengan pemimpin Soviet Nikita Khrushchev untuk menghindari konfrontasi militer secara langsung (U.S. Department of State, n.d.). Meskipun banyak analisis melihat bahwa keberhasilan menghindari perang sebagai validasi teori penangkalan, beberapa kajian kritis justru menunjukkan bahwa kegagalan awal Amerika Serikat dalam mengirim sinyal penangkalan yang tegas kepada Uni Soviet telah membuka ruang bagi eskalasi krisis.

Namun demikian, sebagian besar ilmuwan realis tetap memandang bahwa kehadiran senjata nuklir dan potensi kehancuran mutual menjadi penyeimbang utama yang mendorong para pemimpin kedua negara untuk mengambil langkah-langkah yang lebih hati-hati dan terukur. Ketakutan bersama akan kehancuran global mendorong kedua pihak untuk menempuh jalur diplomatik, yang berpuncak pada kesepakatan rahasia di mana Uni Soviet menarik rudalnya dari Kuba dan AS berjanji menarik rudal Jupiter dari Turki (U.S. Department of State, n.d.). Keberhasilan penyelesaian krisis ini tidak hanya karena kekuatan militer yang dimiliki Amerika Serikat, tetapi juga berkat kemampuan untuk menerapkan logika deterrence secara konsisten, serta menggabungkannya dengan strategi diplomasi dan manajemen krisis (Afifah Winda Ramadhani, 2025). Tidak kalah pentingnya adalah keberhasilan menjaga disiplin militer di tengah tekanan tinggi serta kemampuan menjalin komunikasi lintas saluran, baik resmi maupun informal. Setelah krisis, muncul kesadaran bahwa stabilitas jangka panjang tidak dapat disandarkan semata pada ancaman kekuatan, tetapi harus ditopang oleh sistem kontrol strategis yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, krisis tersebut mendorong artikulasi baru dalam kebijakan kontrol senjata global dan mempercepat munculnya norma-norma baru dalam tata kelola strategis nuklir. Pendirian "Hotline" Washington–Moskow sebagai sarana komunikasi darurat antara pemimpin kedua negara menunjukkan kesadaran bahwa krisis serupa bisa terjadi kembali dan membutuhkan respons cepat. Selain itu, ratifikasi Partial Test Ban Treaty (1963) yang membatasi uji coba nuklir di atmosfer, bawah laut, dan luar angkasa menjadi tonggak awal pengembangan kerangka kerja hukum internasional untuk pengendalian senjata nuklir. Langkah-langkah ini mencerminkan bahwa stabilitas strategis tidak dapat bergantung sepenuhnya pada logika penangkalan, tetapi juga harus diperkokoh oleh perangkat institusional yang mampu mengatur, mengawasi, dan merespons dinamika strategis global secara kolektif.

Krisis ini juga mempercepat pergeseran dari doktrin *massive retaliation* ke strategi *flexible response*, yang diperkenalkan oleh pemerintahan Kennedy dan dikembangkan lebih lanjut oleh NATO. Pendekatan baru ini menandai transisi penting dari strategi yang bersifat reaktif dan total ke strategi yang lebih adaptif dan proporsional. Dalam implementasinya, strategi ini memberikan spektrum pilihan tindakan militer yang dapat disesuaikan dengan tingkat ancaman yang dihadapi, sehingga meminimalkan risiko eskalasi tidak terkendali. Dengan mengadopsi pendekatan yang mengintegrasikan respons militer, diplomasi, dan aspek psikologis, strategi keamanan kolektif pasca-Krisis Rudal Kuba mengalami transformasi signifikan menuju model yang lebih fleksibel, realistis, dan berorientasi pada pencegahan konflik (Saskia Nursukma et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana strategi penangkalan nuklir, sebagaimana diformulasikan oleh John M. Collins, bekerja dalam menciptakan dan mempertahankan stabilitas selama Perang Dingin, khususnya dalam konteks Krisis Rudal Kuba dan juga mengkaji bagaimana pengalaman dari krisis tersebut turut mendorong transformasi dalam pendekatan pengendalian senjata global dan strategi keamanan kolektif internasional.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep *deterrence* dilihat sebagai proses psikologis dan politis, di mana ketakutan yang dibangun secara rasional menjadi pencegah utama terhadap tindakan agresif. Pada kerangka teori hubungan internasional, *deterrence* menjadi mekanisme komunikasi implisit yang menyampaikan pesan bahwa setiap agresi akan dibalas secara destruktif. Pada karya *Nuclear Deterrent Strategies*, Collins (2002) menegaskan bahwa senjata nuklir pada dasarnya paling efektif digunakan bukan di medan perang, tetapi dalam menciptakan kebuntuan strategis (*strategic stalemate*) yang stabil dan tahan lama. Doktrin ini mengasumsikan bahwa aktor negara bersifat rasional dan akan menghindari konfrontasi langsung jika mereka menyadari bahwa hasil dari konflik tersebut adalah kehancuran bersama. Gagasan ini kemudian dikodifikasi dalam konsep MAD (*mutually assured destruction*). Collins (2002) mengidentifikasi berbagai bentuk penangkalan, mulai dari penangkalan minimum yang hanya membutuhkan kekuatan balasan terbatas, hingga penangkalan maksimum yang menekankan superioritas total, serta pendekatan kompromi seperti *counterforce* yang bertujuan menghancurkan target militer musuh secara selektif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-historis untuk menganalisis efektivitas strategi penangkalan nuklir John M. Collins dalam konteks Krisis Rudal Kuba 1962 melalui telaah terhadap data sekunder yang mencakup dokumen kebijakan, pidato resmi, serta proses negosiasi diplomatik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis berdasarkan lima komponen utama strategi nuklir Collins, yaitu *deterrence* (MAD), *flexible response*, *command and control*, *arms control*, dan *war termination*. Melalui pendekatan ini, studi mengevaluasi bagaimana penerapan komponen-komponen tersebut berhasil mencegah eskalasi nuklir

sekaligus menjadi katalisator bagi transformasi dalam sistem pengendalian senjata global dan pendekatan keamanan kolektif internasional pasca-peristiwa tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Lima Elemen Strategi Nuklir Collins

Krisis Rudal Kuba 1962, yang terjadi selama puncak Perang Dingin, dapat dianalisis secara strategis melalui lima elemen utama dalam kerangka strategi nuklir menurut John M. Collins: *deterrence* (*Mutual Assured Destruction/MAD*), *flexible response*, *command and control*, *arms control*, serta *war-termination*. Dalam dinamika krisis ini, kelima elemen tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain dalam mencegah eskalasi menuju konflik nuklir terbuka.

Elemen *deterrence*, khususnya dalam bentuk doktrin *Mutual Assured Destruction* (MAD), sangat mewarnai keseluruhan keputusan politik dan militer selama krisis. Kesadaran bahwa perang nuklir total akan membawa kehancuran bersama bagi kedua pihak menciptakan semacam pengendalian psikologis yang mencegah kedua negara melakukan serangan pertama. Amerika Serikat, yang pada saat itu unggul secara kuantitatif dalam jumlah dan jangkauan senjata nuklir strategis, memanfaatkan posisi tersebut untuk menyampaikan sinyal penangkalan yang jelas. Pidato Presiden John F. Kennedy pada 22 Oktober 1962 menegaskan bahwa peluncuran satu rudal dari Kuba akan dianggap sebagai serangan langsung dari Uni Soviet dan akan dibalas dengan serangan penuh. Ini adalah contoh konkret dari *deterrence by punishment*, yaitu ancaman pembalasan yang sangat menghancurkan untuk mencegah tindakan agresif dari lawan. Di sisi lain, Uni Soviet, melalui Nikita Khrushchev, juga menyadari bahwa jika konflik berkembang menjadi perang nuklir, tidak akan ada pihak yang menang, sehingga kompromi menjadi pilihan rasional (Allison, 2022).

Selanjutnya, penerapan *flexible response* terlihat jelas dalam strategi Amerika Serikat yang tidak memilih jalur serangan langsung ke instalasi rudal di Kuba, melainkan memberlakukan blokade laut. Pilihan ini mencerminkan fleksibilitas strategis dalam merespons ancaman nuklir Soviet, karena memungkinkan tekanan militer dilakukan tanpa harus memicu konfrontasi langsung. Blokade tersebut memberi ruang bagi proses negosiasi diplomatik dan menghindari eskalasi militer yang tidak terkendali. Lebih lanjut, diplomasi rahasia antara Jaksa Agung Robert Kennedy dan Duta Besar Soviet Anatoly Dobrynin memperlihatkan bagaimana strategi respons fleksibel dapat berjalan bersamaan dengan jalur komunikasi backchannel untuk mencapai penyelesaian damai.

Aspek *command and control* menjadi sangat krusial selama krisis ini. Dalam situasi yang sangat menegangkan, kontrol yang ketat terhadap peluncuran senjata nuklir menjadi hal yang mutlak untuk mencegah insiden tidak terduga. Salah satu contoh nyata dari pentingnya sistem komando dan kendali adalah insiden penembakan pesawat pengintai U-2 Amerika Serikat oleh pasukan pertahanan udara Soviet di Kuba pada 27 Oktober 1962. Penembakan ini hampir memicu respons militer dari pihak AS. Insiden tersebut menggarisbawahi risiko besar dari eskalasi yang tidak disengaja akibat kegagalan komunikasi vertikal di dalam struktur militer. Pelajaran dari insiden ini kemudian memicu pembentukan sistem komunikasi langsung antara Washington dan Moskow, yang diwujudkan melalui *Hotline Agreement* tahun 1963, sebagai upaya meningkatkan efektivitas *command and control* di masa depan.

Meskipun pada saat krisis berlangsung *arms control* belum berkembang sebagai rezim formal, krisis ini berperan penting sebagai titik balik dalam evolusi kontrol senjata nuklir. Kedua negara menyadari bahwa tanpa adanya mekanisme pengaturan dan verifikasi yang transparan, risiko mispersepsi dan salah kalkulasi akan terus menghantui stabilitas strategis global. Dalam periode pasca-krisis, sejumlah perjanjian penting berhasil disepakati, termasuk *Partial Test Ban Treaty* (1963), *Non-Proliferation Treaty* (1968), serta dimulainya perundingan *Strategic Arms Limitation Talks* (SALT) pada 1969 (Fulham, 2022). Dengan demikian, Krisis Rudal Kuba menjadi katalisator yang mendorong kesadaran internasional akan pentingnya *arms control* sebagai instrumen strategis dalam mencegah perang nuklir di masa depan.

Penyelesaian krisis ini mencerminkan penerapan prinsip *war-termination*. Di mana kedua pihak menyadari bahwa melanjutkan konfrontasi hanya akan membuka jalan menuju bencana global. Sehingga kemudian disepakati Uni Soviet menarik seluruh rudal nuklirnya dari Kuba secara terbuka, sementara Amerika Serikat secara diam-diam sepakat untuk menarik rudal Jupiter dari Turki. Hal ini memungkinkan kedua pemimpin untuk mengakhiri krisis pada titik keseimbangan yang optimal. Prinsip *war-termination* dalam konteks ini tidak berfokus pada kemenangan mutlak, melainkan pada stabilisasi situasi sebelum konflik berkembang menjadi perang terbuka.

Evaluasi Efektivitas Strategi Penangkalan dalam Krisis Rudal Kuba

Strategi penangkalan nuklir merupakan pilar utama dalam arsitektur keamanan global selama Perang Dingin, terutama bagi Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman militer dari Uni Soviet. John M. Collins, seorang analis strategi militer Amerika, merumuskan strategi penangkalan nuklir dengan menekankan pentingnya kemampuan serangan kedua (*second-*

strike capability) sebagai bentuk jaminan keamanan. Strategi ini dibangun atas dasar pemahaman bahwa stabilitas strategis hanya dapat dicapai apabila kedua belah pihak memiliki kemampuan untuk membalas serangan nuklir secara destruktif, sehingga menciptakan kalkulasi biaya yang tinggi bagi agresor potensial. Dalam konteks ini, strategi penangkalan bertujuan bukan hanya untuk menahan serangan musuh, melainkan untuk menciptakan keadaan yang membuat penggunaan senjata nuklir menjadi pilihan paling tidak rasional secara strategis dan politis (Gardner, 2004).

Krisis Rudal Kuba tahun 1962 menjadi ujian paling nyata terhadap efektivitas strategi penangkalan nuklir. Ketika Uni Soviet menempatkan rudal balistik jarak menengah di Kuba, hanya sekitar 145 kilometer dari wilayah daratan Amerika Serikat, situasi global berada di ambang perang termonuklir. Amerika Serikat, melalui Presiden John F. Kennedy dan Dewan Keamanan Nasionalnya, merespons penempatan tersebut dengan deklarasi blokade militer dan meningkatkan status siaga pasukan nuklir. Dalam konteks ini, strategi penangkalan nuklir memainkan peran sentral dalam mencegah eskalasi konflik menjadi konfrontasi militer terbuka. Ancaman penggunaan senjata nuklir, yang tertanam dalam doktrin Collins, dipahami secara implisit oleh Uni Soviet sebagai risiko eksistensial yang harus dihindari (Gardner, 2004; Wilson, 2021).

Keberhasilan strategi penangkalan dalam krisis ini juga tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Thomas Schelling mengenai stabilitas strategis. Menurut Schelling, stabilitas dapat dicapai apabila kedua pihak mampu mempertahankan kemampuan nuklirnya meskipun terjadi serangan pendahuluan. Ini berarti bahwa kemampuan serangan kedua menjadi penentu utama dalam menjaga keseimbangan kekuatan (Wilson, 2021). Dalam Krisis Rudal Kuba, kedua negara menyadari bahwa konflik terbuka akan berujung pada kehancuran bersama (*mutually assured destruction*), sehingga jalan negosiasi menjadi opsi yang lebih rasional. Hal ini menunjukkan bahwa doktrin penangkalan nuklir tidak hanya bekerja sebagai ancaman militer, tetapi juga sebagai instrumen diplomatik dalam mendorong kompromi politik.

Namun demikian, strategi penangkalan nuklir juga dipengaruhi oleh dinamika teknologi militer. Pada awal dekade 1960-an, perkembangan teknologi memungkinkan deteksi dini dan pemantauan intelijen terhadap aktivitas rudal dan peluncuran nuklir. Hal ini meningkatkan kredibilitas penangkalan karena memperkuat asumsi bahwa tidak ada serangan mendadak yang bisa dilakukan tanpa terdeteksi, sehingga memperkuat keyakinan terhadap efektivitas serangan balasan (Derleth & Pickler, 2022). Selain itu, pengembangan sistem komunikasi dan kontrol yang lebih baik memungkinkan pelaksanaan komando yang terkoordinasi dalam menghadapi situasi krisis. Namun, keterbatasan teknologi pada masa itu juga menciptakan ketidakpastian

strategis. Misalnya, keterbatasan dalam kemampuan menyerang secara presisi dapat menimbulkan risiko eskalasi yang tidak diinginkan.

Sehingga dalam hal ini, kontribusi strategi penangkalan Collins tampak jelas pada penekanan kesiapan militer dan ancaman yang dapat dipercaya (*credible threat*) berhasil membentuk persepsi di pihak lawan bahwa setiap serangan terhadap AS akan dibalas dengan kekuatan dahsyat. Fakta bahwa Uni Soviet akhirnya menarik rudal-rudalnya dari Kuba merupakan indikasi bahwa strategi penangkalan berhasil mendorong perubahan kebijakan melalui tekanan strategis, bukan melalui konflik terbuka (Gardner, 2004; Wilson, 2021). Akan tetapi, efektivitas strategi ini juga menimbulkan sejumlah kritik. Salah satu kritik utama adalah asumsi bahwa para aktor negara selalu bertindak rasional. Seperti yang dijelaskan oleh Keith B. Payne (2011) dalam teorinya mengenai deterrence, model aktor rasional terlalu menyederhanakan kompleksitas perilaku manusia dalam pengambilan keputusan di tengah tekanan krisis. Kenyataannya, keputusan strategis seringkali dipengaruhi oleh persepsi yang keliru, mispersepsi, atau kalkulasi politik domestik yang tidak sepenuhnya rasional. Dengan demikian, strategi penangkalan yang hanya mengandalkan asumsi rasionalitas berisiko tidak efektif apabila pihak lawan bertindak di luar kalkulasi rasional Barat.

Selain itu, strategi penangkalan juga dapat menciptakan ketegangan psikologis yang ekstrem di antara para pengambil keputusan. Ketergantungan berlebihan pada ancaman nuklir menciptakan kondisi di mana kesalahan komunikasi atau informasi yang salah dapat memicu respons yang tidak proporsional (Adamsky, 2013). Dalam situasi seperti Krisis Rudal Kuba, kesalahan interpretasi terhadap maksud lawan dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, keberhasilan strategi penangkalan selama Perang Dingin juga harus dilihat sebagai hasil dari keberuntungan diplomatik dan komunikasi terbuka antara para pemimpin negara. Pada sisi lain, tantangan terhadap efektivitas penangkalan nuklir juga datang dari perubahan bentuk ancaman dan konflik. Seperti yang dijelaskan oleh Derleth dan Pickler (2022), tantangan keamanan abad ke-21 memerlukan pendekatan penangkalan yang lebih adaptif dan multidimensi. Dalam konteks ini, penangkalan nuklir konvensional memiliki keterbatasan dalam menghadapi ancaman yang bersifat asimetris atau non-konvensional, seperti terorisme nuklir atau serangan siber terhadap sistem komando nuklir. Meskipun dalam konteks Krisis Rudal Kuba strategi ini berhasil, namun dalam konteks yang lebih luas strategi tersebut memiliki batasan struktural dalam menjawab ancaman kontemporer.

Lebih lanjut, keberhasilan strategi penangkalan juga dipengaruhi oleh tingkat paritas kekuatan antara dua aktor utama. Seperti ditunjukkan oleh Cimbala (2006), stabilitas strategis antara AS dan Rusia saat ini masih dipertahankan melalui konsep paritas, tetapi adanya modernisasi persenjataan dan dinamika geopolitik global telah menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan prinsip-prinsip dasar penangkalan. Oleh karena itu, meskipun doktrin Collins terbukti efektif dalam konteks historis, efektivitas jangka panjangnya sangat bergantung pada dinamika kekuatan global dan respons adaptif terhadap tantangan baru.

Transformasi Pengendalian Senjata dan Keamanan Kolektif Global

Krisis Rudal Kuba tahun 1962 menjadi salah satu peristiwa paling kritis dalam sejarah Perang Dingin yang membawa dunia ke ambang perang nuklir. Ketegangan selama tiga belas hari antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak hanya mencerminkan kerapuhan sistem keamanan internasional kala itu, tetapi juga menjadi titik balik dalam pembentukan norma-norma baru mengenai pengendalian senjata dan strategi keamanan kolektif. Krisis ini menciptakan momentum global untuk melakukan refleksi mendalam terhadap bahaya perlombaan senjata dan mendorong transformasi dalam pendekatan keamanan internasional yang lebih berbasis diplomasi, transparansi, dan kerja sama.

Pertama-tama, krisis ini secara fundamental mengubah dinamika hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ketegangan yang hampir berujung pada perang nuklir menyadarkan kedua belah pihak akan pentingnya saluran komunikasi langsung dan pendekatan kooperatif dalam menyelesaikan konflik strategis. Sebagaimana dicatat oleh Hopmann dan King (2019), pengalaman traumatis dari krisis ini mendorong kedua negara untuk meninjau ulang kebijakan luar negeri mereka serta membuka ruang bagi terciptanya kebijakan *détente* di tahun-tahun selanjutnya. Dalam konteks ini, transformasi hubungan bilateral tersebut mencerminkan adanya pengakuan kolektif terhadap kebutuhan akan stabilitas strategis jangka panjang yang tidak semata-mata bergantung pada kekuatan militer.

Salah satu konsekuensi langsung dari krisis ini adalah ditandatanganinya *Partial Nuclear Test Ban Treaty* (PTBT) pada Juli 1963, hanya sepuluh bulan setelah insiden berlangsung. Perjanjian ini melarang uji coba nuklir di atmosfer, luar angkasa, dan bawah laut, serta menjadi tonggak penting dalam mengurangi eskalasi perlombaan senjata nuklir. Upaya ini merupakan bagian dari pendekatan preventif dalam mengurangi kemungkinan konflik bersenjata skala besar melalui pembatasan teknologi militer yang destruktif. Dengan demikian, PTBT menandai langkah awal menuju kebijakan pengendalian senjata yang lebih sistematis dan terstruktur di kancah global.

Krisis Rudal Kuba juga memicu dimulainya berbagai perundingan pengendalian senjata jangka panjang antara kedua negara adidaya. Dalam beberapa dekade berikutnya, proses ini membuahkan berbagai perjanjian penting seperti *Strategic Arms Limitation Talks* (SALT) dan *Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty* (INF) (Krieger, 2009; Woolf, Nikitin, & Kerr, 2016). Perjanjian-perjanjian ini mencerminkan pergeseran dari strategi deterensi berbasis ancaman kekuatan nuklir menuju kerangka kerja institusional yang mengedepankan pengawasan, verifikasi, dan pembatasan senjata secara bilateral. Krieger (2009) menunjukkan bahwa upaya pengendalian ini turut memperkuat stabilitas strategis di kawasan Eropa dan mendorong pembentukan arsitektur keamanan transatlantik yang lebih kohesif. Dalam dimensi hukum internasional, krisis ini menunjukkan poin penting mengenai legitimasi tindakan militer dan pendekatan hukum terhadap keamanan global. Colman (2019) mencatat bahwa pemerintahan Amerika Serikat berusaha memperoleh "dukungan dunia" dan membenarkan blokade terhadap Kuba melalui argumentasi hukum yang disampaikan ke Dewan Keamanan PBB. Tindakan ini menjadi awal dari kebiasaan negara-negara besar untuk membingkai intervensi militer dan kebijakan keamanan melalui prinsip-prinsip legal internasional, yang pada akhirnya memperkuat peran hukum sebagai elemen penting dalam pengendalian senjata dan penyelesaian konflik.

Lebih jauh lagi, krisis ini memperlihatkan pentingnya diplomasi dan mekanisme back-channel sebagai sarana utama dalam meredakan ketegangan internasional. Seperti dikemukakan oleh George (2013) dan Chace (2015), proses resolusi krisis lebih ditentukan oleh komunikasi personal dan negosiasi rahasia antara Kennedy dan Khrushchev ketimbang aksi militer terbuka. Pendekatan ini mengilhami penguatan mekanisme kolektif dan forum multilateral sebagai sarana untuk menjaga perdamaian global, yang pada akhirnya membentuk dasar bagi strategi keamanan kolektif pasca-Perang Dingin. Krisis Rudal Kuba juga mendorong kesadaran internasional terhadap bahaya penyebaran senjata nuklir ke negara-negara lain di luar dua kekuatan utama. Hal ini memicu disusunnya *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT) pada tahun 1968, yang hingga kini menjadi salah satu instrumen utama dalam rezim non proliferasi global (Krieger, 2009; Woolf, Nikitin, & Kerr, 2016). NPT menggabungkan elemen pengendalian senjata, hak penggunaan energi nuklir secara damai, serta komitmen terhadap perlucutan senjata sebagai prinsip kolektif komunitas internasional. Dengan demikian, krisis tersebut berperan sebagai katalis dalam memperluas norma-norma internasional mengenai tanggung jawab negara terhadap senjata pemusnah massal.

Krisis ini, dalam perspektif jangka panjang, memberikan kontribusi terhadap terciptanya lingkungan strategis yang lebih stabil sepanjang paruh kedua Perang Dingin. Troitskiy (2020) menyoroti bahwa pengalaman dari krisis turut membentuk budaya kehati-hatian dalam diplomasi dan perencanaan militer kedua negara adidaya, yang secara tidak langsung membantu mencegah pecahnya perang besar selama beberapa dekade berikutnya. Strategi-strategi ini kemudian diadopsi dalam berbagai forum internasional dan menjadi bagian dari kerangka kerja keamanan kolektif seperti OSCE dan rezim perlucutan senjata PBB. Warisan dari krisis ini juga terus memengaruhi arah kebijakan pengendalian senjata dan nonproliferasi hingga masa kini. Meskipun menghadapi tantangan dalam era multipolar dan ketegangan geopolitik kontemporer, banyak dari struktur institusional dan kerangka hukum yang dibentuk sebagai respons terhadap krisis tersebut masih menjadi fondasi utama dalam arsitektur keamanan global. Woolf, Nikitin, dan Kerr (2016) menunjukkan bahwa katalog perjanjian pengendalian senjata yang berkembang pasca-1962 memainkan peran penting dalam mengendalikan ancaman nuklir di berbagai kawasan dunia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Strategi penangkalan nuklir sebagaimana diformulasikan oleh John M. Collins memainkan peran krusial dalam membentuk dan mempertahankan stabilitas sistem internasional selama Perang Dingin, khususnya dalam konteks Krisis Rudal Kuba tahun 1962. Dalam krisis ini, lima elemen utama strategi nuklir menurut Collins yakni *deterrence*, *flexible response*, *command and control*, *arms control*, dan *war termination*—terbukti bekerja secara terpadu untuk mencegah eskalasi konflik menuju perang nuklir terbuka. Doktrin *Mutually Assured Destruction* (MAD) menjadi fondasi utama dalam menciptakan efek psikologis penangkalan, di mana kedua pihak—Amerika Serikat dan Uni Soviet—menyadari bahwa serangan nuklir akan menghasilkan kehancuran mutual yang tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Keputusan Presiden Kennedy untuk tidak melakukan serangan militer langsung ke instalasi rudal Soviet di Kuba, melainkan memilih strategi karantina maritim, menunjukkan penerapan prinsip *flexible response* yang adaptif dan kalkulatif. Pendekatan ini memungkinkan eskalasi dikendalikan secara proporsional dan membuka ruang diplomasi backchannel yang pada akhirnya berhasil menghasilkan kompromi damai. Aspek *command and control* juga sangat menonjol, terutama setelah insiden penembakan pesawat pengintai U-2 yang hampir memicu respons militer, menunjukkan pentingnya stabilitas komando dalam situasi krisis tinggi. Pembentukan *Hotline* Washington–Moskow pasca-krisis mencerminkan kesadaran kolektif

akan perlunya saluran komunikasi langsung demi mencegah kesalahpahaman strategis serupa di masa depan.

Lebih lanjut, meskipun rezim *arms control* formal belum mapan saat krisis berlangsung, krisis ini menjadi titik balik yang mendorong terbentuknya berbagai perjanjian pengendalian senjata di masa berikutnya, seperti *Partial Test Ban Treaty* (1963), *Non-Proliferation Treaty* (1968), dan pembukaan *Strategic Arms Limitation Talks* (1969). Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas jangka panjang tidak cukup hanya ditopang oleh ancaman militer, tetapi memerlukan struktur hukum dan institusi yang mengatur interaksi strategis secara kooperatif. Konsep *war termination* juga relevan, di mana kedua negara memilih mengakhiri krisis melalui kompromi damai yaitu penarikan rudal Soviet dari Kuba dan rudal Jupiter AS dari Turki demi mencegah kehancuran global.

Namun demikian, efektivitas strategi penangkalan nuklir juga tidak lepas dari kritik. Kritik utama terletak pada asumsi rasionalitas yang terlalu linier, mengingat proses pengambilan keputusan dalam situasi krisis sering kali dipengaruhi oleh persepsi keliru, tekanan domestik, atau emosi pemimpin negara. Selain itu, tantangan kontemporer seperti terorisme nuklir, serangan siber, dan konflik asimetris menunjukkan bahwa strategi penangkalan tradisional memiliki keterbatasan dalam menjawab dinamika ancaman global yang semakin kompleks dan multidimensi. Dari sisi transformasi strategis, Krisis Rudal Kuba menjadi katalisator penting dalam pembentukan arsitektur keamanan kolektif global berbasis diplomasi, transparansi, dan kerja sama internasional. Kesadaran akan bahaya perang nuklir memicu perubahan paradigma dari pendekatan konfrontatif menuju pendekatan kolaboratif yang mengutamakan negosiasi, verifikasi, dan pembatasan senjata secara institusional. Selain itu, krisis ini menegaskan peran penting hukum internasional dalam membingkai tindakan negara, serta memperkuat mekanisme multilateral dalam menjaga perdamaian.

Dengan demikian, warisan strategis dari Krisis Rudal Kuba bukan hanya keberhasilan menghindari bencana nuklir, tetapi juga kontribusi terhadap pembentukan norma-norma global dalam pengelolaan senjata pemusnah massal dan penguatan sistem keamanan kolektif internasional. Krisis ini menunjukkan bahwa dalam dunia yang bersifat anarkis, rasionalitas strategis yang dikombinasikan dengan diplomasi proaktif, komunikasi efektif, dan komitmen terhadap kontrol senjata dapat menjadi fondasi utama dalam membangun stabilitas jangka panjang dan mencegah eskalasi konflik yang destruktif.

DAFTAR REFERENSI

- Adamsky, D. D. (2013). The 1983 Nuclear Crisis - Lessons for Deterrence Theory and Practice. *Journal of Strategic Studies*, 4-41.
- Afifah Winda Ramadhani (2025). Strategi Diplomasi Keamanan Indonesia dalam Menanggulangi Radikalisasi Pasca-Konflik Poso. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2(3). <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.735>
- Akhmad Lazzuardy & Adzkiyak Adzkiyak (2025). Peran Amerika dalam Perang Dingin: Rivalitas dengan Uni Soviet. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan dan Bahasa*, 4(4). <https://doi.org/10.58192/insdun.v4i4.3920>
- Allison, G. (2022). *The Cuban Missile Crisis at 60: Six Timeless Lessons for Arms Control*. Diambil kembali dari Arms Control Association: <https://www.armscontrol.org/act/2022-10/features/cuban-missile-crisis-60-six-timeless-lessons-arms-control>
- Chace, S. (2015). The Cuban Missile Crisis: Leadership as Disturbance, Informed by History. *Journal of Leadership Studies*, 63-68.
- Cimbala, S. J. (2006). Parity in Peril? The Continuing Vitality of Russian-US Strategic Nuclear Deterrence. *Contemporary Security Policy*, 417-434.
- Colman, J. (2019). Toward "World Support" and "The Ultimate Judgment of History": The U.S. Legal Case for the Blockade of Cuba during the Missile Crisis, October–November 1962. *Journal of Cold War Studies*, 150-173.
- Derleth, J., & Pickler, J. (2022). Twenty-first Century Threats Require Twenty-first Century Deterrence. *Connections The Quarterly Journal*, 11-23.
- Dini Ayu Amalia, et al. (2026). Pengaruh Agresi Militer Belanda terhadap Perkembangan Politik Indonesia Tahun 1947-1949. *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 4(1). <https://doi.org/10.62383/sosial.v4i1.1459>
- Farras Zakia Rahman, et al. (2026). Konflik Bersenjata Modern dan Domain Hukum. *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v3i1.1464>
- Fulham, M. O. (2022). *Ask the Experts: The 60th Anniversary of the Cuban Missile Crisis*. Diambil kembali dari NTI: <https://www.nti.org/risky-business/ask-the-experts-the-60th-anniversary-of-the-cuban-missile-crisis/>
- Gardner, H. (2004). From "Balance" to "Imbalance" of Terror. Dalam H. Gardner, *NATO and the European Union: New World, New Europe, New Threats*. Routledge.
- George, A. L. (2013). *The Cuban Missile Crisis: The Threshold of Nuclear War*. Routledge.
- Hopmann, P. T., & King, T. D. (2019). From Cold War to Détente: The Role of the Cuban Missile Crisis and the Partial Nuclear Test Ban Treaty. Dalam O. R. Holsti, *Change In The International System*. Routledge.
- Krieger, W. (2009). SECURITY: German-American Security Relations, 1968-1990. Dalam D. Junker, *The United States and Germany in the Era of the Cold War, 1945-1990: A Handbook*. Cambridge University Press.
- Mauroni, A. (2019, Februari 21). *John Collins on Weapons of Mass Destruction*. (War On Rocks) Retrieved Mei 17, 2025 from <https://warontherocks.com/john-collins-on-weapons-of-mass-destruction/>

- Payne, K. B. (2011). Understanding Deterrence. *Comparative Strategy*, 393-427.
- Saskia Nursukma, et al. (2024). Perbandingan Asas-Asas Hukum Pidana Umum dengan Hukum Pidana Militer pada Sistem Peradilan di Indonesia. *Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 1(4).
<https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i4.360>
- Troitskiy, M. (2020). Why US-Russian arms control can succeed even in a climate of confrontation. *Bulletin of the Atomic Scientists*, 91-96.
- U.S. Department of State. (t.thn.). *The Cuban Missile Crisis, October 1962*. Diambil kembali dari <https://history.state.gov/milestones/1961-1968/cuban-missile-crisis>
- Wilson, B. (2021). Keynes Goes Nuclear: Thomas Schelling and the Macroeconomic Origins of Strategic Stability. *Modern Intellectual History*, 171-201.
- Woolf, A. F., Nikitin, M. B., & Kerr, P. K. (2016). Arms Control and Nonproliferation: A Catalog of Treaties and Agreements. Dalam C. Edwards, *U.S Arms Control and Nonproliferation: A Catalog of Treaties and Agreements and the Evolution of Cooperative Threat Reduction* (hal. 1-99). Nova Science Pub Inc.